



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Sisingamangaraja No. 100 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 21580

Website : www.taputkab.go.id; e-mail : inspektur@taputkab.go.id



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Siangmangaja No. 100 Tanjung 22411
Sumatera Utara Telp. (0833) 21590
Website : www.tapanulid.go.id e-mail : inspektord@tapanulid.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan bagi kita semua, sehingga dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat ini mengacu pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan dijabarkan dalam satu periode, yaitu tahun 2023 secara sistematis.

Dalam melaksanakan kegiatan selama periode 2023, Inspektorat merencanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 40 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Dimana dalam program - program tersebut menggambarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke depan pada umumnya sehingga dapat mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	9
2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.....	18
2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1. Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.....	20
BAB V PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2023	11
Tabel 3.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan prinsip memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, tetap mengacu pada rencana tata ruang yang dilaksanakan secara bersama semua pemangku kepentingan dalam bingkai satu kesatuan.

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan professional dan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN-RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) ddalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang indenpenden, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintahan, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan

berbasis kinerja dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik, dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang lebih disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perubahan Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dibidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 10) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 11) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 56 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dengan rincian sebagai berikut :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Parameter pengukuran kinerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode semester I (pertama).
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.
- 2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp.13.105.590.657,00 yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Pada saat berlalunya waktu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Pergeseran (Recofusing) anggaran untuk pemenuhan anggaran belanja pegawai PPPK yang baru diangkat pada tahun 2023, dimana anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan sebesar 13,35% menjadi Rp.11.355.818.942,00.

Untuk hasil Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, meliputi 3 (program) program yang terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota target anggaran semula sebesar Rp9.525.590.557,00 menjadi Rp.

8.860.488.942,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp4.556.899.075,00 atau sebesar 51,43%.

- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan target anggaran semula sebesar Rp2.780.000.000,00 menjadi Rp.2.062.530.000,00 pada Triwulan II per tanggal 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp662.834.000,00 atau sebesar 32,14%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi anggaran semula sebesar Rp800.000.000,00 menjadi Rp432.800.000,00 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp92.013.400,00 atau 21,26%. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Triwulan II yang ditampilkan adalah data realisasi per tanggal 30 Juni 2023, dikarenakan sedang dalam proses perhitungan sampai dengan Triwulan berjalan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Semester I Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Pelaksanaan Semester I Tahun 2023

No	Kode	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Triwulan 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)								
				5			6			7			8			9			10			11			12 = 8+9+10			13 = 6 + 12			14=13/5x100%			15=12/7 x100%		
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
1	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penuhan Layanan Administrasi yang terlayani	2310	38.884.776.307	1073	15.908.740.328	514	9.084.688.942	111	1.698.691.262	151	2.858.207.813										262	4.556.899.075	1335	20.465.639.403	57,79%	55,79%							50,97%	50,16%
2	6.01.01.2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	38	56.714.200	20	18.714.200	9			6	0										6			26	18.714.200	68,42%	33,00%							66,67%	0,00%
3	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	27.003.600	14	7.003.600	7			4	0										4			18	7.003.600	64,29%	25,94%							57,14%	0,00%
4	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	21.959.700	3	9.959.700	1			1	0										1			4	9.959.700	80,00%	45,35%							100,00%	0,00%
5	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	7.750.900	3	1.750.900	1			1	0										1			4	1.750.900	80,00%	22,59%							100,00%	0,00%
6	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	215	20.530.430.288	100	9.415.674.967	55	5.487.436.482	51	731.876.208	1	2.024.152.428									52	2.756.028.636	152	12.171.703.603	70,70%	59,29%							94,55%	50,22%	
7	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190	20.284.222.088	85	9.274.433.967	50	5.438.952.882	50	731.876.208	0	2.012.031.528									50	2.743.907.736	135	12.018.341.703	71,05%	59,25%							100,00%	50,45%	
8	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	226.242.000	12	129.274.800	4	48.483.600	0		1	12.120.900									1	12.120.900	13	141.395.700	65,00%	62,50%							25,00%	25,00%	
9	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	19.966.200	3	11.966.200	1			1	0										1			4	11.966.200	80,00%	59,83%							100,00%	0,00%
10	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawaian yang terlayani	80	2.046.657.200	30	546.657.200	20	460.000.000	0		5	96.124.000									5	96.124.000	35	642.781.200	43,75%	31,41%							25,00%	20,90%	

11	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80	2.046.657.200	30	546.657.200	20	460.000.000	0	-	5	96.124.000	0	0	0	0	5	96.124.000	35	642.781.200	43,75%	31,41%	25,00%	20,90%
12	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	1539	4.306.133.900	680	1.966.666.100	351	1.019.851.700	42	79.168.800	112	203.710.200	-	-	-	-	154	282.879.000	834	2.248.545.100	54,19%	52,24%	43,87%	27,74%
13	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	50.107.300	12	15.113.300	4	10.005.000	1	3.542.900	0	-	-	0	0	0	1	3.542.900	13	18.656.200	65,00%	37,23%	25,00%	35,41%
14	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17	461.088.300	12	241.088.300	4	125.800.000	0	-	2	24.757.700	-	0	0	0	2	24.757.700	14	265.846.000	82,35%	57,66%	50,00%	19,68%
15	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	87.416.900	12	22.418.900	4	12.500.000	1	4.116.000	0	-	-	0	0	0	1	4.116.000	13	25.534.900	65,00%	30,35%	25,00%	32,93%
16	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20	273.388.900	12	138.129.100	4	58.452.700	0	-	2	17.763.000	-	0	0	0	2	17.763.000	14	155.692.100	70,00%	57,02%	50,00%	30,39%
17	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42	74.979.600	12	40.763.600	15	17.108.000	0	-	3	4.130.000	-	0	0	0	3	4.130.000	15	44.893.600	35,71%	59,87%	20,00%	24,14%
18	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1420	3.359.152.900	620	1.509.152.900	320	795.986.000	40	71.509.900	105	157.059.500	-	0	0	0	145	228.569.400	765	1.737.722.300	53,87%	51,73%	45,31%	28,72%
19	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213	6.404.400.800	132	2.758.366.000	31	1.372.730.000	8	841.500.000	22	422.920.000	-	-	-	-	30	1.264.420.000	162	4.022.786.000	76,06%	62,81%	96,77%	92,11%
20	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	213	6.404.400.800	132	2.758.366.000	31	1.372.730.000	8	841.500.000	22	422.920.000	-	0	0	0	30	1.264.420.000	162	4.022.786.000	76,06%	62,81%	96,77%	92,11%
19	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	60	488.492.300	36	216.498.700	12	133.696.800	2	16.536.834	3	28.245.846	-	-	-	-	5	44.882.682	41	261.381.344	68,33%	53,51%	41,67%	33,57%
20	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	33.415.000	12	17.415.000	4	6.000.000	0	-	1	1.700.000	-	0	0	0	1	1.700.000	13	19.115.000	65,00%	57,20%	25,00%	28,33%
21	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20	253.083.700	12	106.083.700	4	73.200.000	1	7.536.834	1	13.001.466	-	0	0	0	2	20.638.300	14	126.722.000	70,00%	60,07%	60,00%	28,19%
22	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20	201.993.600	12	93.000.000	4	54.496.800	1	9.000.000	1	13.544.382	-	0	0	0	2	22.544.382	14	115.544.382	70,00%	57,20%	50,00%	41,37%

23	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	165	2.851.947.618	75	986.183.159	36	610.973.960	2	29.509.420	8	83.055.337				10	112.564.757	85	1.098.727.916	51,52%	38,53%	27,78%	16,42%
24	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Unit Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	534.743.163	2	196.014.543	1	138.807.620	0	12.514.370	1	31.869.187	0	0	0	1	44.383.557	3	240.398.100	75,00%	44,96%	100,00%	31,97%
25	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	86	1.525.664.758	38	440.595.416	20	246.690.340	0	15.595.050	4	48.996.150	0	0	0	4	64.591.200	42	505.186.616	48,84%	33,11%	20,00%	26,18%
26	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	6	723.868.200	3	326.658.200	1	211.190.000	0	-	0	-	0	0	0	0	-	3	326.658.200	60,00%	45,13%	0,00%	0,00%
27	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	70	67.671.500	32	22.895.000	14	14.286.000	2	1.400.000	3	2.190.000	0	0	0	5	3.590.000	37	26.485.000	52,86%	39,14%	35,71%	25,13%
30	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	1648	11.424.277.700	1026	5.254.277.700	283	1.891.130.000	40	263.720.000	76	399.114.000				116	662.334.000	1145	5.917.111.700	69,56%	51,79%	40,99%	35,05%
31	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana	830	5.611.974.500	493	2.041.974.500	142	471.130.000	10	116.380.000	48	213.334.000				58	329.714.000	551	2.371.688.500	65,75%	42,26%	40,85%	69,98%
32	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	224	1.102.952.700	135	502.952.700	44	85.380.000	0	-	15	22.050.000	0	0	0	15	22.050.000	150	525.002.700	66,96%	47,60%	34,09%	25,86%
33	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	224	810.667.700	135	210.667.700	44	5.220.000	0	-	15	5.220.000	0	0	0	15	5.220.000	150	215.887.700	66,96%	26,63%	34,09%	100,00%
34	6.01.02.2.01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	5	90.057.500	3	55.057.500	1	-	0	-	1	-	0	0	0	1	-	4	55.057.500	80,00%	61,14%	100,00%	0,00%
35	6.01.02.2.01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	5	93.413.700	3	58.413.700	1	-	0	-	1	-	0	0	0	1	-	4	58.413.700	80,00%	62,53%	100,00%	0,00%
36	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75	2.021.223.900	45	921.223.900	15	142.200.000	3	56.220.000	4	85.980.000	0	0	0	7	142.200.000	52	1.083.423.900	69,33%	52,61%	46,67%	100,00%
37	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	4	126.220.000	2	26.220.000	1	-	1	-	0	-	0	0	0	1	-	3	26.220.000	75,00%	20,77%	100,00%	0,00%

38	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	301	1.367.439.000	170	267.439.000	36	238.430.000	6	60.160.000	12	100.084.000	0	0	0	18	160.244.000	188	427.683.000	62,46%	31,28%	50,00%	67,21%
39	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	808	5.812.303.200	536	3.212.303.200	141	1.420.000.000	30	147.340.000	28	185.780.000	58	333.120.000	594	3.545.423.200							
40	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	8	253.952.500	6	53.952.500	1	-	0	-	0	-	0	0	6	53.952.500	75,00%	21,25%	0,00%	#DIV/0!			
41	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	800	5.558.350.700	530	3.158.350.700	140	1.420.000.000	30	147.340.000	28	185.780.000	0	0	58	333.120.000	588	3.491.470.700	73,50%	62,81%	41,43%	23,46%	
42	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	148	2.112.375.300	89	512.375.300	35	380.000.000	1	19.285.000	8	72.748.400	9	92.013.400	98	604.388.700	86,22%	28,61%	25,71%	24,21%			
43	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana	8	432.800.000	2	32.800.000	2	-	0	-	0	-	0	0	2	32.800.000	25,00%	7,58%	0,00%	#DIV/0!			
44	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	216.400.000	1	16.400.000	1	-	0	-	0	-	0	0	1	16.400.000	25,00%	7,58%	0,00%	0,00%			
45	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	4	216.400.000	1	16.400.000	1	-	0	-	0	-	0	0	1	16.400.000	25,00%	7,58%	0,00%	0,00%			
46	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	140	1.679.575.300	87	479.575.300	33	380.000.000	1	19.285.000	8	72.748.400	9	92.013.400	96	571.588.700	68,57%	34,03%	27,27%	24,21%			
47	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	221.766.900	28	21.766.900	10	-	0	-	2	-	0	0	2	21.766.900	66,67%	9,82%	20,00%	0,00%			

48	16.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48	224.221.000	28	24.221.000	12	50.000.000	0	3	0	0	3	31	24.221.000	68,89%	10,80%	25,00%	0,00%
49	16.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	210.415.000	1	10.415.000	2	50.000.000	0	1	9.281.000	0	1	9.281.000	2	40,00%	9,36%	50,00%	18,56%
50	16.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45	1.023.172.400	30	423.172.400	9	280.000.000	1	2	63.467.400	0	3	82.732.400	33	73,33%	49,44%	33,33%	29,55%
TOTAL				4104	50.221.429.307	2191	21.875.393.328	832	11.355.818.942	152	235	3.330.070.213	0	387	5.311.746.475	2578	62,82%	53,74%	46,51%	46,78%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				46,51																
PREDIKAT KINERJA				Sedang																

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan.

Dalam penyelenggaraan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan pada Triwulan II (Semester I) Tahun 2023, antara lain :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan II dengan realisasi kinerja sebesar 50,97% dan realisasi anggaran sebesar 50,16% yang memiliki 7 Kegiatan antara lain :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- B. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Triwulan II dengan realisasi kinerja sebesar 40,99% dan realisasi anggaran sebesar 35,05% yang memiliki 2 Kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Triwulan II dengan realisasi kinerja sebesar 25,71% dan realisasi anggaran sebesar 24,21% yang memiliki 2 Kegiatan antara lain :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan; dan
 2. Pendampingan dan Asistensi.

Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,75% dari APBD;
4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan

6. Peningkatan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) bagi para pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas dan fungsi yang berat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mendapatkan tantangan dan peluang, seperti :

a. Tantangan :

- 1) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja perangkat daerah;
- 2) Implementasi pengendalian intern pada perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik;
- 3) Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
- 4) Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu dilakukan pengawasan;
- 5) Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Peluang :

- 1) Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN;
- 2) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
- 3) Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran.

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh RSUD Sidoarjo Barat untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

1. Meningkatkan fasilitas sarana prasarana di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Mengoptimalkan anggaran khususnya dalam melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. Memenuhi kebutuhan SDM (Auditor dan PPUPD) di Lingkungan Inspektorat Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan.

Dalam usaha : 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja; dengan sasaran : 1) Pelaksanaan Pengendalian Internal Sesuai Standar. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 akan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - 1) Kinerja rutin pengawasan;
 - 2) Pengawasan prioritas nasional;
 - 3) Pengawasan reformasi birokrasi; dan
 - 4) Penegakan Integritas.
- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti : Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: Laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- d. Kegiatan reviu.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah tertuang dalam :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Rumusan perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi yang terlayani	100%	DAU	927	832	13.105.590.657	11.355.818.942
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlayani	100%	DAU	9	9	14.000.000	-
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DAU	7	7	8.000.000	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	DAU	1	1	4.000.000	-
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	DAU	1	1	2.000.000	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan yang terlayani	100%	DAU	55	55	5.620.826.397	5.487.436.482
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	DAU	50	50	5.569.342.797	5.438.952.882
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	DAU	4	4	48.483.600	48.483.600
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	DAU	1	1	3.000.000	-
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Kepegawalan yang terlayani	100%	DAU	20	20	500.000.000	460.000.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DAU	20	20	500.000.000	460.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100%	DAU	351	351	864.004.700	1.019.851.700
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	DAU	4	4	15.000.000	10.005.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	DAU	4	4	100.000.000	125.800.000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	DAU	4	4	25.000.000	12.500.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	DAU	4	4	56.896.700	58.452.700
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	DAU	15	15	17.108.000	17.108.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target		Target	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DAU	320	320	650.000.000	795.986.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	DAU	74	31	1.646.034.800	1.372.730.000
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	DAU	74	31	1.646.034.800	1.372.730.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	DAU	12	12	133.996.800	133.996.800
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	DAU	4	4	6.000.000	6.000.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	DAU	4	4	73.500.000	73.200.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	DAU	4	4	54.496.800	54.496.800
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	DAU	36	36	846.727.960	610.973.960
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	DAU	1	1	138.807.620	138.807.620
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	DAU	20	20	485.074.340	246.690.340
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	DAU	1	1	198.000.000	211.190.000
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Unit	DAU	14	14	24.846.000	14.286.000
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100%	DAU	333	283	2.680.000.000	1.891.130.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana	100%	DAU	192	142	1.680.000.000	471.130.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Laporan	DAU	45	44	300.000.000	85.280.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan	DAU	45	44	300.000.000	5.220.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	DAU	1	1	15.000.000	-
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	DAU	1	1	15.000.000	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Target Kinerja		Target Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	DAU	15	15	500.000.000	142.200.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Internal yang dibentuk	Kesepakatan	DAU	1	1	50.000.000	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	DAU	84	36	500.000.000	238.430.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100%	DAU	141	141	1.000.000.000	1.420.000.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	DAU	1	1	100.000.000	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	DAU	140	140	900.000.000	1.420.000.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pemenuhan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%	DAU	37	35	800.000.000	380.000.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebutuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang terlaksana	100%	DAU	4	2	200.000.000	-
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	DAU	2	1	100.000.000	-
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan disusun	Rekomendasi	DAU	2	1	100.000.000	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kebutuhan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%	DAU	33	33	600.000.000	380.000.000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	DAU	10	10	100.000.000	-
6.01.03.2.02.02	Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	DAU	12	12	100.000.000	50.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	DAU	2	2	100.000.000	50.000.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	DAU	9	9	300.000.000	280.000.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan kebijakan pengawasan serta pengelolaan keuangan Tahun 2023 untuk meraih keberhasilan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.

Tarutung, 07 - 08 - 2023



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**Drs. ERIKSON SIAGIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690422 198903 1 003**